





- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Paraf I	Paraf II
	

- J. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- K. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- L. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktik adalah Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;

Paraf I	Paraf II
h	f.



- (3) Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak;
- (4) Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
- (5) Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak, adalah segala fasilitas yang tersedia di ruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- (6) Penelitian adalah Proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah
- (7) Pengabdian masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan Nasional :

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Kerja lapangan di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

BAB III  
RUANG LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak  
serta pembimbing Praktik



PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak Utara Pontianak serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Kerja Lapangan

Pasal 4  
Tata Cara Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Kerja Lapangan dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Pasal 5  
Pengawasan

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktik Kerja Lapangan di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak;
- (2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Kerja Lapangan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
	



Pasal 6  
Ketenagaan

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik Kerja Lapangan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak Utara sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

#### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Kerja Lapangan dari PIHAK PERTAMA ;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerjasama mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Kerja Lapangan di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.



#### BAB V

#### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

#### Biaya Praktik

- (1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes kemenkes Pontianak sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Orang/Per Hari di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak Utara.



Paraf I	Paraf II
	

- (2) Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di tempat Praktek SDN yang lain dengan pembayaran di bebankan ke Mahasiswa yang bersangkutan
- (3) Pihak Pertama berkewajiban membayar jasa sewa lahan Pada Pihak Kedua melalui Nomor Rekening .....Atau setor tunai Di Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer atau setor tunai.

Paraf I	Paraf II
	





BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II
	



BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telp : (0561) – 882632  
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com  
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 41 Pontianak  
Jalan : Gusti Situt Mahmud Gang Swasembada 2  
Telp : .....

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 16

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala

Sekolah Dasar Negeri 41

Pontianak



Nuryanti, S.Pd

NIP. 197507251998072001

PIHAK PERTAMA

Direktur

Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak



Dokter Hariyadi, S.Gz.M.Si

NIP. 197112311992031010